

Pimpinan DPRD DIY Sikapi Rencana Kebijakan Lockdown

Logis, saat Penularan Covid-19 Tidak Terkendali

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengungkapkan rasa prihatin menyikapi kondisi penularan Covid-19 di DIY selama beberapa waktu terakhir. Dia menilai keadaan sekarang cukup mengkhawatirkan.

SITUASI sebelum libur Lebaran tidak bisa dipertahankan. Keadaannya telah berbalik 180 derajat. "Saat ini angka penularannya sudah di atas 500 orang.



Antisipasinya harus ada pembatasan," ungkap Nuryadi kemarin (21/6).

Dia memahami gagasan Gubernur DIY Hamengku Buwono X yang ingin menerapkan kebijakan

lockdown atau karantina wilayah. Pertimbangannya, mencegah agar penularan Covid-19 semakin tidak terkendali. "Pandangan gubernur itu patut didukung," tegas ketua dewan.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta menambahkan, pemaknaan bed di sejumlah rumah sakit telah mencapai 70 persen. Bahkan di beberapa rumah sakit keadaan unit gawat darurat (UGD) sudah kian memprihatinkan. Ini menyebabkan warga yang terpapar



SUARA WAKIL RAKYAT: Ketua DPRD DIY Nuryadi merasa prihatin melihat penularan Covid-19 di DIY selama beberapa waktu terakhir. Dia memahami dengan pandangan Gubernur DIY Hamengku Buwono X yang berencana menerapkan kebijakan lockdown.

Covid-19 tidak mendapatkan penanganan yang maksimal. "Sistem kesehatan kolaps dan beban tenaga kesehatan yang semakin berat membuat

keadaan semakin kritis," ujar Huda. Menyadari kenyataan itu, dia menilai gagasan menerapkan kebijakan *lockdown* di DIY merupakan pemikiran

yang logis. Yakni saat tidak mampu lagi mencegah laju penularan Covid-19. Namun demikian, Huda berpendapat kebijakan *lockdown* harus dirumuskan

secara lebih detail. Tujuannya, agar dapat dilaksanakan secara maksimal. "Apa yang disampaikan gubernur dapat dimaknai sebagai peringatan agar semua pihak benar-benar menjalankan protokol kesehatan (prokes) mulai dari tingkat RT/RW hingga tingkat teratas," katanya.

Dikatakan, saat upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal, namun keadaan masih memburuk, bukan tidak mungkin *lockdown* total menjadi pilihan. "Itu opsi terakhir," tegasnya. Menyinggung soal anggaran saat kebijakan *lockdown*, sampai sekarang belum dibicarakan Pemda DIY dengan dewan. Termasuk menyangkut penggunaan APBD DIY.

"Harus dipikirkan mereka yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan harian. *Lockdown* ini adalah peringatan yang ditekankan agar kesadaran masyarakat terbangun," ingat mantan Presiden BEM UGM ini.

Terkait penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, Huda meminta kepada semua pihak agar menyalahkan siapapun. Tidak perlu pula saling menyalahkan. Ke depan, tindakan yang diperlukan adalah penanganan dan pencegahan semaksimal mungkin. Mencegah dampak yang lebih besar.

Wakil ketua dewan ini juga menyinggung penyediaan shelter pada 78 titik. Meski belum operasional, dapat dijadikan sebagai tempat penyangkutan warga yang memiliki gejala terpapar virus korona. Dengan adanya shelter itu diharapkan dapat membantu penanganan Covid-19. (* /kus/rg)

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta: Jl. Malioboro 54 Yogyakarta 55213 Telp.: (0274) 512688, 560293, 565622. Fax: (0274) 580692. Email: setwan@dprd-diy.go.id

RADAR JOGJA

Soft Skills Anak Panti Asuhan di Era Pandemi

Pandemi Covid-19 ternyata menggila lagi. Terjadi lonjakan jumlah penyintas Covid-19. Di beberapa daerah rumah sakit rujukan pasien Covid-19 hampir penuh. Tempat pemakaman sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi pasien meninggal akibat serangan Covid-19 pun sudah sesak.

PENINGKATAN jumlah penyintas Covid-19 tersebut diprediksi sebagai dampak dari mudik hari raya. Meski telah ada aturan larangan mudik. Tetapi ternyata tak sedikit masyarakat tetap pulang kampung. Akibatnya terjadi penambahan signifikan pada penderita.

Selain peristiwa mudik. Peningkatan jumlah penderita Covid-19 diperkirakan dari abainya berbagai kalangan terhadap protokol kesehatan. Kerumunan masih terjadi di mana-mana. Berbagai aktivitas mengundang banyak orang tetap berlangsung. Kondisi ini membikin Covid-19 tak berkesudahan menghinggapi banyak orang yang lalai akan protokol kesehatan.

Pandemi Covid-19 belum bisa dibendung. Tentu saja mempengaruhi kebijakan publik. Termasuk dunia pendidikan. Seperti institusi

pendidikan telah mengagendakan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru ini. Pertimbangan dilaksanakan pembelajaran tatap muka, realitasnya lebih efektif dibanding dengan pola pembelajaran daring.

Dalam realisasinya, memang ada banyak masalah terkait pembelajaran daring. Problem pembelajaran daring menyangkut kesiapan sumber daya pengajar, praktik pembelajaran, dan pendampingan selama belajar dari rumah. Problem semakin terasa selama pembelajaran daring yang menuntut anak didik belajar dari rumah tumbuh di panti asuhan. Problem yang terjadi adalah keterbatasan pengasuh menyebabkan pendampingan belajar dari rumah tak maksimal. Hal ini membuat tugas sekolah yang dibebankan guru pada siswa untuk dikerjakan di panti asuhan tak dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk keluar dari masalah keterbatasan pengasuh mendampingi belajar dari rumah di rumah, maka diperlukan pada anak panti asuhan. Hal ini dilakukan Tim Pengabdian Masyarakat LPPM UAD dengan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan belajar dari rumah di Panti Asuhan wilayah Imogiri, Bantul. Harapannya dari pemberdayaan ini, anak asuh memiliki kemampuan *soft skills* memadai selama proses pembelajaran daring. Sehingga anak-anak



panti asuhan memiliki keterampilan psikologis untuk mengatasi masalah selama belajar dari rumah, meski tak selalu didampingi pengasuh.

Pelaksanaan pemberdayaan belajar dari rumah dengan menerapkan *soft skill training*. Pelatihan yang diberikan berupa motivasi belajar. Pelatihan ini bertujuan untuk memotivasi anak panti asuhan memiliki dorongan, minat, menstimulasi dirinya mempunyai keinginan kuat menghasilkan tugas terbaik, dan mencapai prestasi tertinggi meski proses pembelajaran diterapkan secara daring.

Pelatihan *soft skills* lain yang diberikan adalah

manajemen waktu. Tujuan dari diberikannya pelatihan manajemen waktu berdasarkan dari *training need analysis* yang dihasilkan dari wawancara terhadap pengasuh ditemukan anak-anak kurang terampil dalam mengelola waktu. Karena pengawasan terhadap anak panti asuhan yang kurang maksimal sering meninggalkan tugas sekolah. Anak panti asuhan lebih banyak bermain dengan anak panti yang lain. Ketika sudah bermain menjadi lupa ada tugas sekolah yang harus dikerjakannya. Maka pelatihan manajemen waktu bertujuan mewujudkan kemampuan anak asuh terampil dalam mengelola waktu secara efektif dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang banyak dikerjakan di panti asuhan. Hal ini bermanfaat menjadikan anak asuh dapat mengumpulkan tugas sesuai target yang telah ditentukan oleh guru.

Keterbatasan dari pengasuh menuntut adanya kemandirian dari anak panti asuhan menjadi perhatian tersendiri dalam *soft skills training*. Perhatian dialokasikan pada kemandirian karena keinginan menjaga prestasi belajar anak panti asuhan. Agar keterampilan *soft skills* ini dapat dicapai, anak panti asuhan perlu dilatih kemandirian. Pelatihan kemandirian bermanfaat menumbuhkan kemampuan anak asuh untuk mengerjakan tugas belajar dengan ke-

suksesan hati dan atas insiatif sendiri dengan tidak menggantungkan pada pengawasan dan pendampingan pengasuh. Ada atau tidak ada pengasuh. Anak panti asuhan tetap serius mengerjakan tugas sekolah.

Sentuhan mengenai *soft skills training* agar anak panti asuhan memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi hambatan dan rintangan selama pembelajaran daring dapat dikuatkan dengan pelatihan kepribadian *hardiness*. Pelatihan kepribadian *hardiness* membentuk individu memiliki ketangguhan, kekuatan, dan mengurangi stress. Sehingga pelatihan kepribadian *hardiness* mampu membangun daya juang agar tahan uji menghadapi tugas yang sulit selama belajar di panti asuhan. Kepribadian *hardiness* ini dapat menjadi pondasi anak panti asuhan memiliki mental baja saat menghadapi tugas sekolah yang terasa berat dilakoninya.

Semoga dengan pemberdayaan belajar dari rumah menggunakan *soft skills training* menjadikan anak panti asuhan tetap memiliki prestasi yang tinggi. Meski anak panti asuhan berada pada situasi prihatin diterpa badai pandemi Covid-19. Aamiin.

¹ Penulis Adalah Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan

Hotel Safira Jadi Tempat Isolasi Mandiri

Kasus Covid-19 di Kota Magelang Cenderung Meningkat

MAGELANG, Radar Jogja - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menambah tempat isolasi bagi pasien positif Covid-19 di Hotel Safira Jalan Gatot Subroto Magelang. Hotel tersebut berisi 52 kamar dengan kapasitas 104 tempat tidur. Penambahan tempat isolasi ini menyusul kasus Covid-19 yang cenderung naik beberapa waktu terakhir. Hal ini berdampak pada menipisnya *bed occupancy rate* (BOR) rumah sakit (RS) rujukan dan tempat isolasi.

"Mereka isolasi mandiri di Hotel Borobudur, sehingga kapasitas hampir penuh. Karena itu, kita cari tambahan lokasi baru untuk isolasi mandiri, karena kasus Covid-19 terutama yang OTG (orang tanpa gejala) makin banyak," ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang, dr Intan Suryahati, kemarin.

Dia menuturkan, sebelumnya sempat dibuka lokasi isolasi mandiri di wisma bayaman. Karena penuh, dialihkan semua ke Hotel Borobudur dengan kapasitas lebih banyak. Meski kapasitas di Hotel Borobudur belum 100 persen terisi, tapi pihaknya sudah bertindak cepat dengan membuka lokasi baru di Hotel Safira. "OTG semakin banyak. Semakin banyak kita



TEMPAT ISOLASI MANDIRI: Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyo saat meninjau layanan Hotel Safira yang dijadikan tempat isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala, kemarin.

tracing dari kontak erat dan makin banyak pemeriksaan swab, sehingga kian banyak yang ditemukan positif. Siang ini langsung kita buka Hotel Safira untuk lokasi isolasi mandiri dengan 52 kamar, terdiri dari 104 tempat tidur," jelasnya.

Intan menyebutkan, yang isolasi mandiri di hotel hanya yang OTG. Sementara yang bergejala dirawat di rumah sakit rujukan. Sekretaris Daerah Joko Budiyo mengatakan, dirinya sudah meninjau langsung Hotel Safira untuk memastikan hotel itu layak untuk tempat isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala. Ia juga memastikan Hotel Safira ditutup untuk umum. Hotel tiga lantai itu seluruhnya difungsikan untuk isolasi terpusat Covid-19. "Hotel Safira untuk isolasi terpusat agar lebih terawasi dan terpan-tau, karena kita jaga 24 jam. Kami terjunkan Linmas 6 personel, tenaga kesehatan, dan dokter puskesmas yang akan memantau," katanya.

Tim juga memperhatikan asupan makanan, harus makan tiga kali sehari. "Tidak usah khawatir, karena biayanya sudah ditanggung APBD

Kota Magelang," tutur Joko.

Joko yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Magelang tersebut menjelaskan, kondisi isolasi terpusat di Hotel Borobudur sudah penuh sejak Sabtu (19/6). Penyebabnya yaitu lonjakan besar kasus Covid-19. Bahkan, pekan ini termasuk yang terbesar sejak kasus pertama ditemukan Maret 2020 lalu.

"Minggu ini menjadi yang terbesar selama penanganan pandemi Covid-19 di Kota Magelang berlangsung. Sejak Senin (14/6) sampai Sabtu (19/6), ditemukan lebih dari 200 kasus. Padahal sebelumnya, di wilayah ini konsisten hanya belasan dan paling banyak 80-an per pekan, tapi sekarang sudah tiga digit," jelasnya.

Demikian halnya dengan RS rujukan, meski hanya menangani pasien Covid-19 bergejala, tetapi kapasitasnya makin menipis. Tadinya, RSUD Tidar dapat menampung pasien bergejala ringan hingga berat. Namun saat ini, RS itu hanya menangani pasien dengan gejala menengah sampai berat saja. (jko/bah/rg)

PKL Nekat Jualan di Alun-Alun Wonosari

Dikarenakan Lahan Relokasi Belum Siap

GUNUNGKIDUL, Radar Jogja - Upaya sterilisasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Wonosari menemui sejumlah kendala. Salah satunya belum tersedianya lahan relokasi. Akibatnya masih ditemukan pedagang nekat berjualan.

Kepala Bidang Penegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunungkidul, Sugito mengatakan kegiatan pengawasan dan penertiban PKL di Kawasan Alun-Alun oleh pemkab terus dilakukan. Hal itu sudah sesuai dengan Perda No 03 Tahun 2015. "Bahwasannya di sekitaran lingkungan Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilarang untuk berjualan," kata Sugito saat dihubungi kemarin (21/6).

Dia mengakui, hingga sekarang masih saja ada pedagang kaki lima tidak mengindahkan larangan tertulis yang dipasang di sekitaran alun-alun. Secara visual menjadi tidak teratur dan terkesan kumuh. Untuk menindaklanjuti petugas melakukan pengawasan dan penertiban. "Diharapkan para pedagang kaki lima meny-

dari bahwa tidak boleh berjualan di sekitaran alun-alun," ujarnya.

Menurutnya Alun-Alun Pemkab Gunungkidul merupakan wajah dari ibu kota kabupaten sekaligus merupakan area titik nol. Namun diakui praktik di lapangan penegakan perda tidak selalu berjalan dengan mulus. "Mulai dari belum adanya lahan relokasi dan keterbatasan jumlah SDM Satpol PP," terangnya.

Sugito mengatakan, sebenarnya ada beberapa alternatif bagi PKL untuk berjualan, mulai dari Pasar Hewan Siyoharjo dan bekas terminal bus di Besole. Namun dua lokasi tersebut dinilai pedagang kurang ramai. "Di Siyoharjo sepi, sementara Besole harus bayar karena lokasi tanah milik kas desa (Kalurahan Baleharjo)," ungkapnya.

Sedangkan di taman kuliner, Sugito menyebutkan lokasi sudah terlalu padat. Meski tidak menutup kemungkinan diperluas. Pihaknya meminta pedagang bersabar dan tetap tidak melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Seorang PKL, Wasdi mengaku biasa jualan di kawasan alun-alun. Namun itu dulu ketika belum mengetahui adanya larangan dari pemerintah. Sekarang dengan gerobak dorongnya, ia berkeliling kota Wonosari. (gun/bah/rg)